



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUMPANG MUHAMMAD
2. Jabatan : DIREKTUR SDM DAN UMUM
3. NHK : 175930

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.700.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 663.000.000
3. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 408.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/95 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.147.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/94 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.820.000.000
6. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **533.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, YADEA T9 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	330.575.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.034.780.600
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.005.572.212
F. HARTA LAINNYA	Rp.	927.425.000
Sub Total	Rp.	11.531.852.812
III. HUTANG	Rp.	192.816.027
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.339.036.785

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.